PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 25 Maret 2015 Halaman: 9

MUSRENBANG LIBATKAN DEWAN

Ekonomi Kerakyatan Belum Tergarap Maksimal

YOGYA (KR) - Sektor ekonomi kerakyatan hingga saat ini dinilai belum tergarap maksimal. Oleh karena itu, pada 2016 mendatang atau tahun terakhir kepemimpinan Haryadi Suyuti - Imam Priyono, menjadi prioritas untuk lebih ditajamkan.

Hal itu dikemukakan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Yogyakarta, Selasa (24/3). "Musrenbang sekarang ini kan untuk kegiatan tahun mendatang. Harapan saya menajamkan ekonomi kerakyatan itu," ungkapnya.

Haryadi menilai, target pembangunan yang sudah terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya bisa direalisasi. Namun ia optimis di tahun 2016, seluruhnya berhasil dijalankan.

Pada tahun lalu, realisasi kegiatan fisik tercapai 94,39 persen. Sedangkan realisasi keuangan 84,27 persen. Salah satu penyebab hasil kinerja yang belum terlalu tinggi tersebut lantaran terlambatnya penetapan APBD 2014 hingga tiga bulan. Selain itu, tahun lalu juga tidak ada APBD Perubahan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad menuturkan, sektor ekonomi kerakyatan sudah menjadi fokus di antara 7 prioritas pembangunan. Bahkan pihaknya juga melibatkan kalangan dewan pada Musrenbang tingkat kota. "Ini kan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. Tapi memang ada pendekatan politis dengan adanya pokok-pokok pikiran dari dewan," paparnya.

Salah satu wujud ekonomi kerakyatan itu antara lain dengan peningkatan dukungan penumbuhan kelompok usaha di masyarakat. Pihaknya sudah menjaring masukan dari warga terkait kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh pemerintah. "Selain sektor ekonomi kerakyatan itu, kami juga fokus pada bidang kesehatan. Terutama angka kelahiran hidup dari seribu bayi yang dilahirkan," imbuhnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengaku, pihaknya masih diberi waktu hingga satu bulan ke depan untuk merumuskan pokok pikiran dewan. Pokok pikiran tersebut merupakan hasil dari penjaringan aspirasi pada masa reses awal Maret lalu.

Menurut Sujanarko, hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan harus menjadi prioritas utama. Hal itu karena murni merupakan usulan dari masyarakat secara langsung. "Objek dan subjek pembangunan itu kan di warga. Jadi, itu harus jadi acuan," tandasnya. **(Dhi) -k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005